

PROSES PERENCANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Muhamad Reza¹⁾

rezamsi@yahoo.co.id

¹⁾Dosen Prodi. Agribisnis, Fakultas Pertanian,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pendekatan, tahapan, faktor pendorong dan penghambat dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian di wilayah kerja Nagari. Penelitian dirancang sebagai penelitian deskriptif. Waktu yang digunakan selama 1 bulan dihitung dari tanggal 1 s/d 30 Maret 2015. Lokasi penelitian pada 8 Nagari yaitu Nagari Talang Maur, Nagari Mungo, Nagari Suliki, Nagari Balai Panjang, Nagari Guguk VIII Koto, Nagari Batu Balang, Nagari Pauh Sangik, Nagari Piobang di Kab. 50 Kota. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, diskusi kelompok dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 8 orang penyuluh pertanian nagari, dipilih secara *purposive*. Fokus data penelitian ini adalah karakteristik informan penelitian, pendekatan, tahapan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan tahapan reduksi data, *display* data, penyimpulan dan verifikasi, selanjutnya data dianalisis dengan metode sintesis. Selanjutnya untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian digunakan bantuan *rating scale*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) masih ada penyuluh yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); 2) Pendekatan partisipatif belum sepenuhnya diterapkan dalam penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian; 3) Tahapan yang dilalui belum sesuai dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan /OT.140/5/2009; 4) Kerjasama dan ketersediaan data menjadi faktor utama untuk keberhasilan penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian. Sedangkan rendahnya kemauan petani untuk mau terlibat merupakan faktor utama penghambat pencapaian keberhasilan penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian.

Kata Kunci: Partisipasi Petani, PRA, Proses Perencanaan Program Penyuluhan, Faktor Pendorong dan Penghambat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada masa Orde Baru, penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan mempedomani perencanaan program yang telah disusun oleh pemerintah pusat, pendekatan tersebut dikenal dengan pendekatan *top-down*. Pasca reformasi, perencanaan program penyuluhan pertanian disusun dengan melibatkan petani, terutama pada wilayah kerja Desa/Nagari yaitu melalui metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pendekatan yang digunakan pada pasca reformasi lebih dikenal dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut dinilai sesuai dengan karakter sistem pemerintahan saat ini yaitu menciptakan demokrasi di negeri ini (Departemen Pertanian, 2009).

Pergeseran pendekatan yang digunakan dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian, secara otomatis diikuti oleh seluruh wilayah yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Salah satu wilayah yang menjadi basis pembangunan pertanian di Sumatera Barat adalah Kabupaten 50 Kota, dimana wilayah ini memiliki dukungan SDA dan SDM serta teknologi yang cukup baik dalam kegiatan pertaniannya. Selain itu, kelembagaan pendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian seperti

kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten juga sudah dimiliki oleh wilayah ini. Artinya, kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah Kabupaten 50 Kota telah memiliki wadah yang baik, bila dibandingkan dengan wilayah lainnya yang belum memiliki kelembagaan penyuluhan pertanian. Selain itu, kelembagaan penyuluhan di Kabupaten juga dapat mencerminkan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian termasuk juga dalam menyusun perencanaan program penyuluhannya lebih terorganisir (.).

Melalui kegiatan perencanaan, program penyuluhan dapat diselenggarakan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dihubungkan dan ditarik asumsi-asumsi (Setiana, Lucie. 2005). Perencanaan program penyuluhan merupakan proses pengambilan keputusan yang menghasilkan suatu pernyataan tertulis mengenai situasi, masalah tujuan dan cara mencapai tujuan untuk mengubah perilaku kelayan ke arah kehidupan yang lebih baik (Dirlanudin. 2011). Perencanaan program penyuluhan diperlukan untuk: (1) memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara teliti tentang hal-hal yang harus dilakukan; (2) menyediakan acuan tertulis yang dapat diunakan oleh masyarakat; (3) menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap adanya saran penyempurnaan; (4) memantapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai; (5) menghindarkan pemborosan sumberdaya yang tersedia; dan (6) menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan di dalam dan oleh masyarakat (Rejeki, MC Ninik Sri, 1998; Lestari dkk, 2000; Setiana, 2005; Mubyarto, 1979).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan /OT.140/5/2009, perencanaan program penyuluhan pertanian (programa penyuluhan pertanian), disusun berdasarkan tingkatan wilayah kerja. Tingkatan wilayah kerja terendah akan mengeluarkan programa penyuluhan Desa/Kelurahan/Nagari atau unit kerja lapangan, selanjutnya hasilnya akan digunakan oleh penyuluh untuk menyusun perencanaan program penyuluhan tingkat Kecamatan. Hasil yang didapatkan dari tingkat Kecamatan akan digunakan untuk menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota, begitu seterusnya hingga ke tingkat pemerintahan pusat (Departemen Pertanian, 2009).

Keterlibatan petani secara langsung terdapat pada wilayah kerja Desa/Kelurahan/Nagari. Petani diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau sumber data dalam menyusun perencanaan program penyuluhan. Perencanaan program penyuluhan pertanian dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya, keberadaan poktan/gapoktan, keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Penggalian data ini dilakukan oleh penyuluh bersama-sama dengan tokoh dan anggota masyarakat petani guna menjaring kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

Perbedaan yang paling mencolok dalam proses penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian saat ini adalah keterlibatan petani, selain itu, tahapan yang dilalui dalam proses penyusunannya cukup panjang, sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang berbeda dengan pendekatan yang dilakukan pada zaman orde baru. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengungkap kondisi sebenarnya, mengenai proses yang dilalui penyuluh dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian. Apakah proses yang dilalui penyuluh benar-benar telah mengacu pada peraturan yang berlaku? Pertanyaan ini penting untuk diungkap secara ilmiah, karena hasil perencanaan program penyuluhan pertanian dengan melibatkan petani, pasti akan berbeda dengan yang tidak melibatkan petani sama sekali. Selain itu, pengimplementasian partisipatif dalam proses penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian, merupakan amanat demokrasi dalam pembangunan pertanian.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendekatan yang digunakan penyuluh dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian?
2. Bagaimana tahapan yang dilalui penyuluh dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian?
3. Apafaktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi pendekatan yang digunakan penyuluh dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian.
2. Mendeskripsikan tahapan yang dilalui penyuluh dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian.
3. Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian.

METODOLOGI PENELITIAN

Merujuk pada tujuan dari penelitian, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam jenis penelitian deskriptif, karena penulis berkeinginan untuk memaparkan gambaran dilapangan, serta meminimalisasikan bias dan memaksimalkan reabilitas (Nazir, 2013; Arikunto, 2010; Thody, 2006; Emilia, 2009). Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 1 bulan terhitung dari bulan 1-30 Maret 2015. Daerah penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota tetaptnya pada 8 Nagari yaitu Nagari Talang Maur, Nagari Mungo, Nagari Suliki, Nagari Balai Panjang, Nagari Guguak VIII Koto, Nagari Batu Balang, Nagari Pauh Sangik, Nagari Piobang.

Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari hasil diskusi mendalam dengan informan penelitian dan data sekunder yang berasal dari instansi BP4K Kabupaten Lima Puluh Kota, kantor BPS Provinsi Sumatera Barat, kantor Balai Penyuluh Kecamatan, kantor Wali Nagari. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan diskusi kelompok. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, berjumlah 8 orang penyuluh pertanian diwilayah kerja Nagari. Fokus data penelitian ini adalah karakteristik informan penelitian, pendekatan, tahapan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan tahapan 1) reduksi data, 2) display data, 3) penyimpulan dan verifikasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode sintesis. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian digunakan bantuan *rating scale*. Tahapan untuk menetapkan faktor-faktor tersebut dilakukan melalui diskusi kelompok dengan informan. Melalui informan akan keluar faktor-faktor secara umum, kemudian dilakukan penjarangan dan informan nantinya yang akan memberikan rangking (dari urutan pertama, hingga keurutan paling akhir) pada masing-masing faktor tersebut. Pada bahagian ini, penulis berperan sebagai fasilitator, tanpa melakukan intervensi pada informan untuk menetapkan faktor-faktor tersebut (Wirartha, 2006; Sugiyono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan Penelitian

Data karakteristik informan, dibutuhkan untuk melihat latar belakang dan penguasaan informan terhadap informasi yang akan diberikannya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Karakteristik Informan	Keterangan
1.	Umur	Separuh dari jumlah informan berada pada usia di bawah 40 tahun, dan sisanya berusia di atas 40 tahun.
2.	Jenis Kelamin	Dari jenis kelamin, distribusi informan yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sama banyak, yaitu empat (4) laki-laki dan empat (4) perempuan.
3.	Tingkat Pendidikan	Latar belakang pendidikan informan cukup bervariasi, paling banyak tingkat S1 sebanyak empat (4) orang, tingkat SMA sebanyak tiga (3) orang dan satu orang lagi berpendidikan D3.
4.	Status Pekerjaan	Penyuluh pertanian yang dijadikan informan paling banyak masih menyandang status THL (7 orang), hanya satu orang yang menyandang status PNS.
5.	Lama pengalaman kerja	Sebanyak tujuh (7) orang informan telah bekerja di atas 3 tahun dan sisanya baru 1-3 tahun kerja.

Sumber: Hasil Penelitian, 2015

Pendekatan Yang Digunakan Penyuluh Dalam Menyusun Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian.

Pendekatan yang dimaksudkan disini adalah cara/teknik/metode yang digunakan penyuluh dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian. Secara praktisnya, pendekatan yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian ada dua yaitu pendekatan sentralistik dan pendekatan partisipatif. Pendekatan sentralistik, perencanaan disusun langsung oleh pemerintah yang diwakili oleh penyuluh-penyuluh yang tergabung dalam tim penyusunan program. Sedangkan pendekatan partisipatif, perencanaan program penyuluhan pertanian disusun dari wilayah kerja tersendah (desa/kelurahan/nagari) hingga ketingkat pusat. Khususnya pada tingkat nagari, petani dilibatkan dalam penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian. Adapun pendekatan yang digunakan penyuluh nagari dalam menyusun perencanaan program penyuluhan, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Pendekatan Yang Digunakan Dalam Menyusun Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari.

No	Jenis Pendekatan	Jawaban Informan	Keterangan
1	Disusun sendiri	Tidak ada	Perencanaan program penyuluhan disusun sendiri oleh penyuluh tanpa melibatkan pihak lain terutama petani

2	Memodifikasi dokumen tahun lalu	Tidak ada	Perencanaan program penyuluhan disusun dengan cara merubah/memperbaharui dokumen tahun lalu berdasarkan hasil interpretasi penyuluh itu sendiri
3	Partisipatif (menggunakan metode PRA)	Tidak ada	Perencanaan program penyuluhan disusun dengan menggunakan panduan yang telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan /OT.140/5/2009
4	Melibatkan petani dalam satu tahapan saja	4 orang	Pendekatan ini telah melibatkan petani dalam menjangkau masalah dan harapan yang diinginkan petani untuk dicantumkan dalam dokumen perencanaan program penyuluhan pertanian.
5	Perpaduan pendekatan no 1, 2 dan 4	4 orang	Perencanaan program penyuluhan disusun dengancara memadukan tiga pendekatan, namun tidak memberikan posisi yang lebih untuk keterlibatan petani.

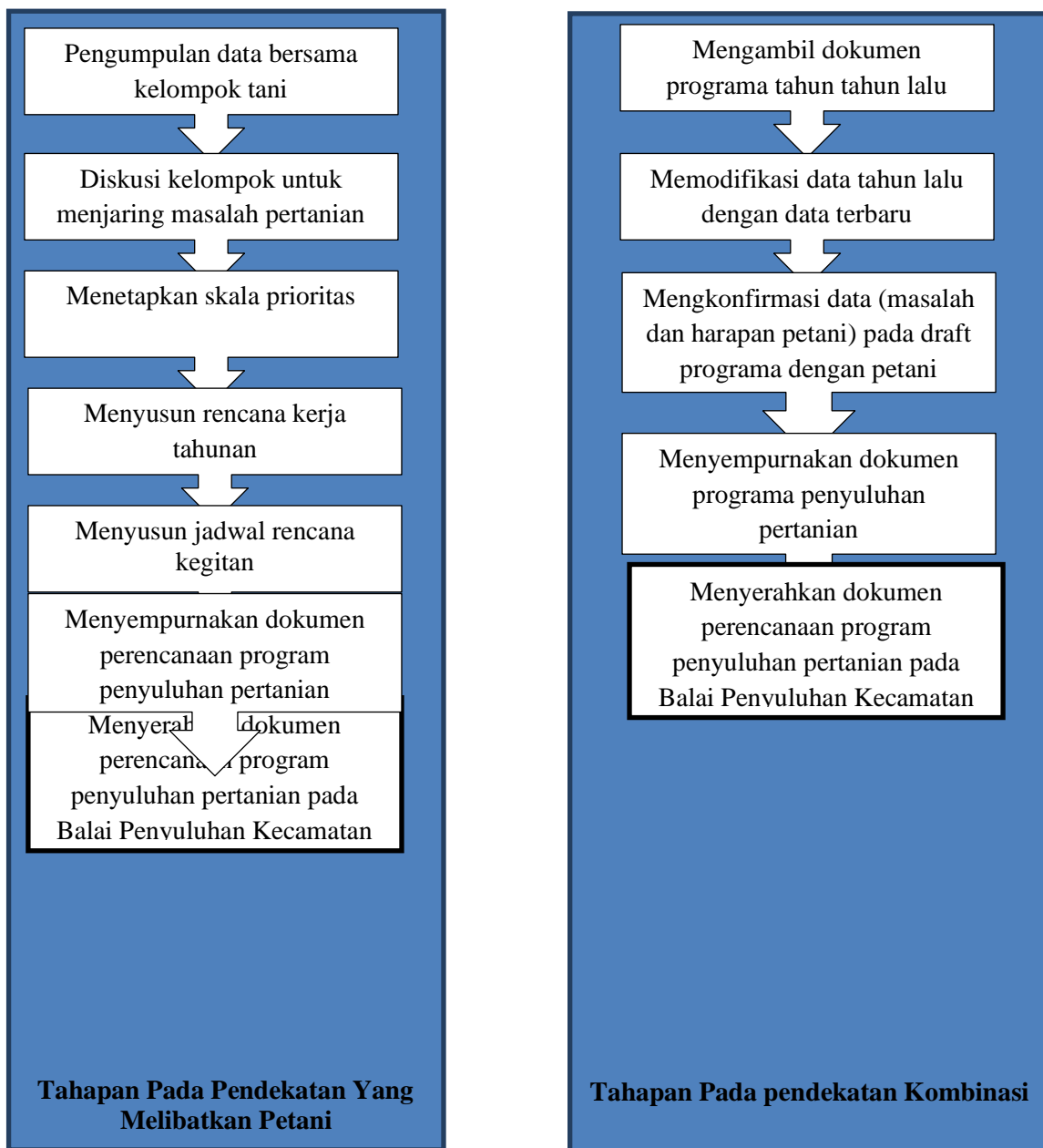
Sumber: Hasil Penelitian, 2015

Data yang terdapat dalam table 2 di atas memperlihatkan bahwasannya penyuluh pertanian belum menerapkan pendekatan partisipatif dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian. Namun demikian, separuh dari informan penelitian telah memberikan ruang pada petani untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian. Petani dilibatkan dalam menjangkau masalah dan harapan yang diinginkan petani untuk dicantumkan dalam dokumen perencanaan program penyuluhan pertanian. Sedangkan penyuluh lainnya memilih untuk menggunakan perpaduan pendekatan, yaitu disusun sendiri, kemudian memodifikasi dokumen tahun sebelumnya dan terakhir baru melakukan konfirmasi pada petani.

Data di atas memperlihatkan bahwa ada permasalahan yang dihadapi oleh penyuluh untuk menerapkan pendekatan partisipatif. Jika, pendekatan partisipatif tersebut mudah untuk diimplementasikan, maka semua penyuluh telah menggunakan pendekatan tersebut. Atau, sebenarnya yang terjadi adalah tidak adanya ruang yang dibuka oleh kelembagaan penyuluhan pertanian untuk membantu penyuluh lapangan dalam menerapkan pendekatan partisipatif. Pada hal, secara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan /OT.140/5/2009, program atau perencanaan program penyuluhan pertanian tingkat nagari, disusun melalui metode PRA.

Tahapan Yang Dilalui Penyuluh Dalam Menyusun Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian.

Tahapan dalam perencanaan program penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh dapat dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu tahapan berdasarkan pendekatan yang melibatkan petani dan tahapan berdasarkan pendekatan yang memadukan pendekatan penyusunan sendiri, memodifikasi dokumen terdahulu dan melibatkan petani. Pada prinsipnya, kedua model tahapan yang dilalui oleh penyuluh dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian, tidaklah terlalu berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Tahapan Dalam Menyusun Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kab.50 Kota

Tahapan-tahapan yang dilalui di atas, belum sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang No 16 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/OT.140/5/2009, perencanaan program penyuluhan pertanian (programa penyuluhan pertanian). Adapun tahapan untuk penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian tingkat desa/nagari menurut kedua landasan hukum di atas adalah penggalan data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya, keberadaan poktan/gapoktan, keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Pendekatan yang semestinya digunakan oleh penyuluh adalah metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*.

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian.

Faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat Nagari, perlu diidentifikasi. Hal ini berkaitan dengan masukan-masukan untuk mengoptimalkan kinerja dalam proses penyusunan program penyuluhan pertanian. Adapun faktor-faktor yang dimaksudkan tersebut, dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian.

No	Variabel	Indikator	Keterangan
1	Faktor Pendorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kerjasama yang baik antara penyuluh, petani, tokoh petani, tokoh masyarakat dan pihak pemerintah nagari 2. Ketersediaan dan kemudahan mengakses data sekunder terbaru. 3. Kondisi politik 4. Teknik komunikasi dengan petani. 5. Anggaran dana. 6. Sarana dan prasarana pendukung penyusunan program penyuluhan pertanian. 	Seluh faktor pendorong ini diidentifikasi dan disusun melalui diskusi kelompok dengan seluruh informan penelitian
2	Faktor Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kemauan petani untuk berpartisipasi 2. Tingkat Pendidikan 3. Umur 4. Kondisi ekonomi petani 	Seluh faktor penghambat ini diidentifikasi dan disusun melalui diskusi kelompok dengan seluruh informan penelitian

Sumber: Hasil Penelitian, 2015

Pada kenyataannya, kerjasama yang baik antar stakeholder, menjadi faktor pendorong pertama untuk keberhasilan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Kerjasama yang baik antara penyuluh, petani, tokoh masyarakat, pemerintah nagari dan pelaku usaha agribisnis, harus tercipta untuk kesempurnaan dokumen perencanaan ini. Akan tetapi, menurut informan, untuk mewujudkan kerjasama yang baik dalam menyusun dokumen perencanaan program penyuluhan pertanian, masih sulit untuk diwujudkan. Perbedaan kepentingan, orientasi dan tujuan, membuat stakeholder tersebut sulit membangun kerjasamanya.

Berikutnya adalah ketersediaan data dan kemudahan dalam mengakses data sekunder, menjadi faktor kedua yang dapat mendorong keberhasilan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Kondisi politik, teknik komunikasi, anggaran dana dan sara prasarana, menjadi faktor berikutnya yang dapat mendorong keberhasilan kegiatan perencanaan. Faktor yang pertama dan kedua, sampai saat ini menurut informan belum dapat dicarikan solusinya dengan baik, sedangkan faktor yang lainnya masih dibisa diatasi oleh penyuluh.

Faktor penghambat keberhasilan yang *pertama* adalah kurangnya kemauan petani untuk mau terlibat dalam proses penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan petani, kondisi ini menghambat dalam transfer ilmu dan inovasi dibidang pertanian. Kebanyakan petani yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, lebih terbuka menerima inovasi dan mudah untuk dilakukan transfer ilmu pengetahuan teknis. Berikutnya adalah umur, petani atau stakeholder lainnya yang berada pada usia yang sudah tidak produktif lagi, lebih mengikuti pengalaman-pengalamannya dalam melakukan usaha pertanian, dibanding petani yang usianya masih muda atau produktif, mereka lebih mau menerima pembaharuan. Faktor ekonomi juga menjadi penghambat dalam kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian. Mereka yang berada pada kondisi ekonomi baik, lebih mau terlibat dalam kegiatan ini bila dibandingkan dengan petani yang kondisi ekonominya pas-pasan. Mereka lebih mengutamakan memanfaatkan waktu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan penyuluh pertanian di wilayah penelitian, masih ada yang tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini membuktikan bahwa kompetensi penyuluh dari segi akademis masih perlu di tingkatkan.
2. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun perencanaan program penyuluhan Nagari, belum menerapkan pendekatan partisipatif. Pendekatan yang digunakan baru sebatas melibatkan petani pada beberapa tahapan kegiatan perencanaan. Selain itu, penyuluh lebih cenderung menggunakan pendekatan yang memadukan penyusunan secara individu, memodifikasi dokumen tahun yang lalu, dan melakukan konfirmasi data kepada beberapa petani.
3. Tahapan yang dilalui penyuluh dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian Nagari, belum sesuai dengan tahapan yang menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA).
4. Kerjasama dan ketersediaan data menjadi faktor utama yang dapat mendorong keberhasilan penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian. Sedangkan rendahnya kemauan petani untuk mau terlibat merupakan faktor utama penghambat pencapaian keberhasilan penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Jakarta.
- Arikunto, S. 2010. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2009. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.
- Dirlanudin. 2011. Perencanaan Program Penyuluhan Kewirausahaan (Pada Pengusaha Mikro Industri Garmen Di Kelurahan Sukawana Kabupaten Serang Provinsi Banten). Jurnal Ilmiah Niagara, Vol 2 No. 1, Januari 2011.
- Emilia, E. 2009. Menulis Tesis dan Disertasi. Alfabeta. Bandung.
- Lestari SB, dkk. 2000. *Manajemen dan Komunikasi Penyuluhan*. Dipakai untuk Kalangan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (PKP) Universitas Gajah Mada 2000, 2001. Yogyakarta (ID) : UGM. Lawrence 1965 dalam Mardikanto, T (2009).
- Mardikanto, Totok. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Mosher. A. T. 1991. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Dinas Pendidikan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- Mubyarto. 1979. Prasarana Pada Widiyarkarya Nasional Teknologi Pedesaan. LIPI. Jakarta.
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Rejeki, MC Ninik Sri, 1998. *Perencanaan Program Penyuluhan (Teori dan Praktek)*.
- Setiana, L. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*.Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Thody,A. 2006. *Writing and Presenting Research*.London:sage Publications.
- Wirartha, M I. 2006.*Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. C.V. Andi OFFESET. Yogyakarta.